



SISTEM EKONOMI LIBERAL PADA MASA KOLONIAL

Oleh :

Anisa Onifah
Ima Saraswati
Zulkarnain

A. Latar Belakang

Revolusi 1848 di Perancis bergema juga di Belanda. Partai Liberalisme menang, hingga ide-ide liberalisme makin berkumandang. Ajaran liberalisme di bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu liberalisme menghendaki dihapuskannya *Culturstelsel* (tanam paksa). Daiantara mereka yang termasuk golongan liberal adalah para pengusaha.

Disamping golongan liberal, terdapat juga golongan Humanis, yang juga menghendaki dihapuskannya sistem tanam paksa. Mereka melihat betapa menyedihkannya rakyat Indonesia akibat diterapkannya tanam paksa itu. Berkat adanya perjuangan kaum liberal dan humanis itu, tanam paksa sedikit demi sedikit terhapuskan. Pada tahun 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir dari tanam paksa. Pada tahun itu dikeluarkan undang-undang yang penting yaitu undang-undang agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah. Dan juga undang-undang gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya *culturstelsel* (tanam paksa), maka dilaksanakanlah di Indonesia politik kolonial liberal.¹

B. Sistem Ekonomi Liberal

Periode sejarah Indonesia 1870-1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Selama masa ini modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur.²

¹ G. Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta : Kanisius. hlm. 19-20

² A. Daliman. 2001. *Sejarah Indonesia Abad 19- Awal Abad 20*. Yogyakarta : FIS UNY. hlm. 47



Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Di satu pihak Undang Undang Agraria itu bertujuan melindungi petani-petani Indonesia terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang-orang asing, dan di pihak lain Undang-Undang tersebut membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia bagi kepentingan perkebunan. Demikianlah sejak tahun 1870 industri-industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia.

Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah serta penghapusan unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia-Belanda. Undang-undang Agraria tahun 1870 membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Hanya orang-orang Indonesialah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asing diperkenankan menyewanya dari pemerintah sampai selama tujuh puluh lima tahun atau dari para pemilik pribumi untuk masa paling lama antara lima dan dua puluh tahun. Perkebunan swasta kini dapat berkembang di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa.

Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan pelayaran dengan kapal uap dari waktu itu mendorong lebih lanjut perkembangan swasta dengan semakin membaiknya sistem perhubungan dengan Eropa. Perbaikan sistem perkapalan juga dapat memperlancar transportasi. Mulai tahun 1877 dibangun adanya pelabuhan, jalur kereta api, pengembangan lalu lintas, dan telekomunikasi. Namun demikian, semua itu bagi rakyat Indonesia hanya menjadi titik awal eksploitasi ekonomi baru oleh kaum kapitalis (modal swasta).³

Zaman liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi yang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanah mereka kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar. Berkembangnya perkebunan-perkebunan tersebut memberikan peluang kepada rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Selain itu juga penetrasi di bidang ekspor import tekstil yang mematikan kegiatan kerajinan tenun di Jawa. Perkembangan pesat perkebunan-perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870-1885. Selama masa ini mereka mampu meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang-barang ini di pasar dunia.

³ M. C. Ricklef. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : UGM Press. hlm. 190



Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret, karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891 harga pasaran tembakau dunia juga turun drastis. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia dikarenakan penanaman gula bityang mulai ditanam di Eropa, sehingga mereka tidak perlu mengimpor lagi gula dari Indonesia.

Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia-belanda. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan tetapi direorganisasi sebagai perseroan terbatas. Bank perkebunan juga tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan, namun setelah adanya krisis 1885 merekapun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan-perkebunan besar itu. Pada akhir abad ke- 19, terjadi perkembangan baru dalam kehidupan ekonomi di Hindia-Belanda. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkandan digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Kehidupan ekonomi Hindia-Belanda, khususnya Jawa mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industriil di negeri Belanda, dan tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin perkebunan besar yang berkedudukan di Jawa.⁴

C. Keadaan Ekonomi Rakyat pada Masa Liberal

Berbeda dengan industri-industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang dengan pesat pada masa liberalisme dan sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial, maka sebaliknya pada masa yang sama tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama Jawa semakin mundur. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan, sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja. Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari penanaman komoditi ekspor yang sifatnya paksaan hanya menimbulkan sedikit perbaikan, karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah, tetapi sumber penghasilan untuk membayar pajak tersebut telah dihapuskan. Penderitaan itu sangat dirasakan terutama di daerah penanaman kopi, karena lahan yang digunakan untuk menanam kopi tidak dapat digunakan lagi untuk penanaman yang lainnya.⁵

⁴ Op. Cit. hlm. 55-56

⁵ Op. Cit. hlm. 190-191



Krisis perdagangan tahun 1885 juga mempersempit penghasilan penduduk Jawa, baik baik berupa upah yang berlaku bagi pekerjaan perkebunan mauoun yang berupa sewa tanah. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat Jawa dapat dilihat pula dari menurunnya angka-angka impor barang-barang konsumsi, seperti tekstil, pada akhir abad ke-19. Di bawah ini beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia khususnya Jawa yaitu :

- a. Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar.
- b. Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis.
- c. Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem *verschoot* (uang muka).
- d. Sistem tanam paksa dihapus, namun diberlakukan sistem batiq saldo.
- e. Krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciutan dalam kegiatan pengusaha-pengusaha perkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk.⁶

DAFTAR PUSTAKA :

Daliman. 2001. *Sejarah Indonesia Abad 19- Awal Abad 20*. Yogyakarta : FIS UNY

G. Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta : Kanisius

M. C. Ricklef. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : UGM Press

⁶ Op. Cit. hlm. 59